



**Sekretariat Daerah
Kabupaten Grobogan**

RENCANA KERJA (RENJA) 2026

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dapat tersusun.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 ini dilakukan guna mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 untuk pelaksanaan tahun ke-5 (lima). Disamping itu juga dalam rangka mendukung implementasi arah kebijakan dan program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Materi pokok Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini mencakup antara lain: Latar Belakang, Tupoksi dan Kewenangan Perangkat Daerah, Visi, Misi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami nantikan demi perbaikan dimasa mendatang.

Demikian harapan kami semoga Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026.

Purwodadi, 15 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



ANANG ARMUNANTO, S.SOS., M.SI.
NIP. 19730122 199302 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah...	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	52
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	54
3.3 Program dan Kegiatan	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	64
4.1 Rencana Kerja Tahunan Ke-1	64
BAB V PENUTUP	81



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	10
Tabel II. 2	Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	22
Tabel II. 3	Rincian Penilaian Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan	22
Tabel II. 4	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
Tabel II. 5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Sekretariat Daerah	30
Tabel II. 6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	38
Tabel III. 1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026	58
Tabel III. 2	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	59
Tabel IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan berawal dari tahap perencanaan yang menjadi landasan sekaligus pemandu arah pembangunan guna mencapai tujuannya. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan rencana Kerja Pemerintah daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD sekaligus menyempurnakan ranwal renja perangkat daerah yang sudah ada menjadi Rencana Kerja.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah pada tahun 2026. Rencana Kerja disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah



4. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja
5. Penetapan Rencana Kerja

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah memuat penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah memuat kebijakan program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk memantapkan sekaligus sebagai pedoman terselenggaranya kegiatan prioritas sesuai dengan arah kebijakan dan tolak ukur sera alat bantu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Disamping itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah:



- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri



- Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 - 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 - 14) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
 - 15) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
 - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;



- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- 19) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.
- 20) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah disusun dengan maksud:

- 1) Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang komprehensif Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi (Tupoksi) untuk periode satu tahun kedepan; dan
- 2) Sebagai pedoman dan arah kebijakan unit organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi serta penjabaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dapat dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini berisi kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisi narasi telaahan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi jumlah program dan jumlah kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada BAB ini berisi Program dan kegiatan yang akan direncanakan akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dapat lebih terarah dan secara administratif dapat memenuhi persyaratan pertanggungjawaban serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang terbatas.

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan memiliki 3 program, 17 kegiatan dan 52 subkegiatan, yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - i. Penataan Organisasi; dan
 - j. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.



- 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan kegiatan:
 - a. Administrasi Tata Pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
 - b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
 - c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Untuk melihat keberhasilan perencanaan tersebut perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan terhadap rencana kerja n-2 yaitu tahun 2024 dan perkiraan capaian rencana kerja n-1 yaitu tahun 2025. Evaluasi tersebut diperlihatkan pada Tabel II.1



Tabel II. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	BB (70,10)	B (64,25)	91,65	BB (72)	BB (72)	100
		Rata-rata Nilai IKM	B (77,70)	A (91,47)	117,72	B (78,70)	B (78,70)	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB (70,10)	B (64,25)	91,65	BB (72)	BB (72)	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan keuangan bagi ASN	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	118 orang/bulan	118 orang/bulan	100	125 orang/bulan	125 orang/bulan	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100	100	100	100	100	100



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	1 paket	1 paket	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	200 orang	200 orang	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100	12 paket	12 paket	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100	12 paket	12 paket	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	100	2 paket	2 paket	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	112 paket	112 paket	100	206 paket	206 paket	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	100	7 paket	7 paket	100



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 paket	5 paket	100	5 paket	5 paket	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2340 laporan	2340 laporan	100	2560 laporan	2560 laporan	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 unit	5 unit	100	15 unit	15 unit	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	6 unit	6 unit	100	23 unit	23 unit	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	50 unit	100	82 unit	82 unit	100



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	21 unit	100	138 unit	138 unit	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	332 unit	332 unit	100	332 unit	332 unit	100



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	8 unit	100	8 unit	8 unit	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	100	200 unit	200 unit	100
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	2 orang/bulan	100	2 orang/bulan	2 orang/bulan	100
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 paket	2 paket	100	2 paket	2 paket	100
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 orang	100	2 orang	2 orang	100



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penataan Organisasi	Prosentase Perangda yang mengimplementasikan dengan baik	95	95	100	95	95	100
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 dokumen	5 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 laporan	4 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	8 dokumen	8 dokumen	10	5 dokumen	5 dokumen	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	50 dokumen	50 dokumen	100
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya kebutuhan kedinasan bagi unsur pimpinan daerah di bidang keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi	100	100	100	100	100	100



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	13 laporan	13 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	15 laporan	15 laporan	100	18 laporan	18 laporan	100
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	12 laporan	100	15 laporan	15 laporan	100
II.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Status Kinerja LPPD	Tinggi (3,43)	Sedang (3,4071)	99,33	Tinggi (3,44)	Tinggi (3,44)	100
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terselenggaranya administrasi tata kelola pemerintahan yang baik	100	100	100	100	100	100
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 dokumen	12 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 dokumen	3 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terselenggaranya Kerjasama Daerah yang baik	100	100	100	100	100	100



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	24 dokumen	24 dokumen	100	10 dokumen	10 dokumen	100
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas						
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya kajian, pelayanan dan informasi hukum	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	23 dokumen	23 dokumen	100	25 dokumen	25 dokumen	100
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 kasus	2 kasus	100	2 kasus	2 kasus	100
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	25 dokumen	25 dokumen	100	25 dokumen	25 dokumen	100
III.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase implementasi kebijakan bidang perekonomian	100	100	100	100	100	100
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100	100	100	100	100	100



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 laporan	6 laporan	100	5 dokumen	5 dokumen	100
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 dokumen	4 dokumen	100	6 laporan	6 laporan	100
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Prosentase PD yang tertib administrasi pembangunan	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	49 dokumen	49 dokumen	100	48 dokumen	48 dokumen	100
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang baik dan sesuai ketentuan di Kabupaten Grobogan	100	100	100	100	100	100
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan LPSE	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi PBJ	12 orang	12 orang	100	23 orang	23 orang	100
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terimplementasinya Kebijakan Bidang SDA	100	100	100	100	100	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5 dokumen	5 dokumen	100	7 dokumen	7 dokumen	100



Berdasarkan Tabel II.1 terdapat 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan :

Program pertama yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai SAKIP dengan target pada tahun 2024 sebesar BB (70,10) yang terealisasi sebesar B (64,25) atau mencapai target 91,65% dan Rata-rata Nilai IKM dengan target pada tahun 2024 sebesar B (77,70) dan terealisasi melebihi target yaitu sebesar A (91,47) atau mencapai 117,72%. Adapun perkiraan capaian atas target tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan rencana, yaitu 100 %.

Program kedua yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Status Kinerja LPPD pada tahun 2024 dengan target capaian Tinggi (3,43) dan terealisasi dengan nilai Sedang (3,4071) atau sebesar 99,33% (realisasi menggunakan hasil nilai pada tahun 2022, dikarenakan nilai tahun 2024 sampai dengan laporan ini disusun belum keluar oleh Kementerian Dalam Negeri). Pada tahun 2025 diperkirakan capaian indikator pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat juga akan mencapai target dengan capaian 100%

Program ketiga, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator program Persentase implementasi kebijakan bidang perekonomian pada tahun 2024 dengan target capaian 100 % dan realisasi capaian sebesar 100 %. Dan perkiraan pada tahun 2025 juga akan dicapai 100 % atas target yang sudah direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan memiliki 1 IKU (Indikator Kinerja Utama) yaitu Nilai SAKIP.

Capaian indikator kinerja tersebut secara rinci dapat dilihat pada table II.2 berikut ini:



Tabel II. 2
Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Indikator Kinerja	Target						Realisasi Capaian				Proyeksi realisasi	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Nilai SAKIP	B 63,00	B 65,00	B 68,00	BB 70,10	BB 72,00	BB 73,50	B 62,96	B 63,27	B 64,25	B 65,93	BB 72,00	BB 73,00

Pada tabel di atas menggambarkan capaian kinerja Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 65,93 dengan predikat “**B**”, hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik” yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel II. 3
Rincian Penilaian Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun		
			2022	2023	2024
A	Perencanaan Kinerja	30	21,41	22,75	23,02
B	Pengukuran Kinerja	30	18,53	18,68	19,16
C	Pelaporan Kinerja	15	10,03	9,42	9,65
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,30	13,40	14,10
Nilai Hasil Evaluasi		100	63,27	64,25	65,93
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagian Perangkat Daerah sudah menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Internal Tahun 2023 kepada Kementrian PANRB melalui laman esr.menpan.go.id.
- 2) Telah Menyusun kebijakan terkait reward and punishment pada Peraturan



- Bupati Grobogan No.7 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 3) Telah Menyusun dan memformalkan pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai dasar pengukuran dan pengumpulan data kinerja pada perangkat daerah.
 - 4) Menggugah dokumen perencanaan turunan seperti Perjanjian Kinerja tahun berjalan milik seluruh Perangkat Daerah pada esr.menpan.go.id.
 - 5) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal berada pada level pengampu kinerja yang tepat;
 - 6) Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan agar seluruh indikator kinerja yang digunakan memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound*) dan cukup;
 - 7) Memperbaiki kualitas pohon kinerja/logical framework dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu mengidentifikasi critical success factor yang menggambarkan aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dan dibutuhkan dalam mewujudkan kinerja utama. Kemudian, pohon kinerja dimanfaatkan menjadi dasar perumusan cascading kinerja hingga ke individu;
 - 8) Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi cross cutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
 - 9) Melakukan optimalisasi pemanfaatan aplikasi Silakip untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala, memberikan saran dan rekomendasi kepada Perangkat Daerah, dan melakukan follow up atas saran dan rekomendasi yang telah diberikan;
 - 10) Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja berkala dengan melengkapi setiap capaian kinerja dengan analisis yang memadai pada laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi;
 - 11) Menyusun Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah yang komprehensif dan memberikan informasi yang memadai sesuai Permenpan RB Nomor



53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja. Selain itu, perlu upaya peningkatan pemahaman penyusunan laporan kinerja pada seluruh Perangkat Daerah sehingga mampu menyajikan Laporan Kinerja yang dapat menjelaskan secara rinci ketercapaian kinerja pada tahun bersangkutan serta memberikan umpan baik dalam upaya perbaikan kinerja mendatang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesenjangan kualitas antara laporan kinerja pada tingkat Pemda dan tingkat Perangkat Daerah;

- 12) Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penetapan target kinerja pada tahun berikutnya, sehingga target bisa lebih menantang;
- 13) Inspektorat selaku quality assurance dalam melakukan cacatan dan rekomendasi yang mendalam, sesuai dengan akar permasalahan pada masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP setiap Perangkat Daerah;
- 14) Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat dalam Laporan Hasil EVALUASI Internal sebagai dasar perbaikan SAKIP yang berkelanjutan.
- 15) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) SAKIP di jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- 16) Melaksanakan desk penyusunan dokumen SAKIP Perangkat Daerah (LKJIP, Perjanjian Kinerja, Laporan Monev Kinerja Triwulanan, Rencana Kinerja Tahunan, Cascading, Reviu Renstra, dll).
- 17) Adanya penilaian setiap tahun dari Kemenpan RB terhadap SAKIP Pemerintah Daerah telah memacu seluruh stakeholder SAKIP untuk terus berbenah dalam rangka menuju *result oriented government*.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai SAKIP ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum menyampaikan dokumen perencanaan turunan seperti PK Kepala Perangkat Daerah di esr.menpan.go.id, pada PK Bupati masih terdapat sasaran yang lebih tepat bila dikawal pada level Perangkat



Daerah, masih terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound), pohon kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis/logical framework.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, aplikasi pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum dimanfaatkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi dan pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum dilengkapi dengan analisis yang memadai.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar bagi penetapan target pada tahun berikutnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi akuntabilitas kinerja internal, hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan catatan dan rekomendasi yang cukup dan menysasar secara langsung ke akar permasalahan yang dialami dalam implementasi SAKIP dan belum sepenuhnya menindaklanjuti laporan hasil evaluasi internal tahun 2023 yang diberikan Inspektorat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;



- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel II.4.

Tabel II. 4
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD	Prioritas Lima Tahun ke Depan	Bagian
				Internal	Eksternal			
1	Layanan administrasi umum	Belum selarasnya data fisik persediaan dengan data penatausahaan persediaan secara keuangan	SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)	Terbatasnya SDM yang khusus menangani persediaan		Perlunya peningkatan ketertiban Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengelolaan Aset dan Pemenuhan kebutuhan logistik kantor Setda.	Umum
2	Penyesuaian penyusunan produk hukum daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rancangan produk hukum daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah	SDM	kurangnya kompetensi di bidang penyusunan produk hukum daerah pada Perangkat Daerah pengusul produk hukum	Perlunya peningkatan SDM di masing-masing perangkat daerah terkait penyusunan produk hukum daerah	Peningkatan kompetensi di bidang penyusunan produk hukum daerah	Hukum
3	Pengendalian Kegiatan/Sub Kegiatan	Pada Saat Pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan Realisasi Fisik belum mencapai target yang direncanakan	Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan OPD	Kuantitas / Jumlah SDM belum mencukupi	Koordinasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan	Belum Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan karena keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan/sub kegiatan	Optimalisasi pengendalian pembangunan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Administrasi Pembangunan
4	Layanan Administrasi Keuangan	Belum terintegrasinya sistem evaluasi kinerja dengan sistem perencanaan dan penganggaran	RPJMD Kab.Grobogan		aplikasi SIPD baru termanfaatkan optimal di tahap perencanaan dan penganggaran, sementara menu/jendela Kinerja belum bisa dipakai	Kurang optimalnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percepatan sinergi pengelolaan data kinerja dan data keuangan	Perencanaan & Keuangan



No	Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD	Prioritas Lima Tahun ke Depan	Bagian
				Internal	Eksternal			
5	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara menyeluruh(komprehensif) di semua perangkat daerah	Skor mengacu pada Indeks Reformasi Birokrasi	Kurangnya internalisasi	Kurangnya sosialisasi dari pusat	Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara menyeluruh/komprehensif pada seluruh perangkat daerah	Mendorong implementasi RB dan SAKIP di seluruh perangkat daerah	Organisasi
6	Kualitas layanan keprotokolan	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolan	Pelayanan yang diberikan selama ini masih didasarkan kebiasaan yang telah dijalani	Adanya personil baru, intensitas kerja yang sangat tinggi	Belum adanya peraturan turunan/tek-nis tentang keprotokolan	Kurang optimalnya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	peningkatan kapasitas personil pengelola layanan keprotokolan dan pembakuan aturan teknis keprotokolan	Protokompim
7	Kinerja BUMD	Rendahnya kualitas layanan BUMD	Indeks Kepuasan Masyarakat	kurangnya personel dan tenaga ahli		Belum Optimalnya kinerja BUMD	Optimalisasi kinerja BUMD	Perekonomian & SDA
8	Batas Daerah	Pemeliharaan batas daerah relatif sulit dilaksanakan karena luasnya wilayah Kabupaten Grobogan serta tersebar patok-patok batas daerah di titik lokasi yang sulit dijangkau serta kurang presisinya deliniasi batas daerah	Permendagri no 2017 tentang Penegasan Batas Daerah	Terbatasnya SDM yang khusus menguasai pemetaan	kurangnya koordinasi/sinergi yg intensif antar daerah	Belum optimalnya pengelolaan batas wilayah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten lain yang berbatasan dengan Kab.Grobogan	Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait batas wilayah dan peningkatan peran serta masyarakat dalam merawat dan menjaga batas daerah masing-masing	Pemerintahan
9	Kerjasama Daerah	Fasilitasi kerjasama daerah dilaksanakan melalui Tim Koordinasi Daerah	Permendagri 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga		belum semua OPD paham terkait prosedur kerjasama daerah	Belum semua kerjasama melalui pembahasan Tim kerjasama Daerah	Peningkatan pemahaman seluruh Perangkat Daerah terhadap prosedur kerjasama daerah	Pemerintahan
10	Regulasi tentang kehidupan beragama	Fasilitasi kehidupan beragama	Peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri no.9 Th.2006 dan No.8 th.2006		Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan	Kurang optimalnya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan kualitas kegiatan yang telah terfasilitasi	Kesra
11	Mekanisme Pengadaan Barang Milik Daerah	Masih ada OPD yang belum memahami kebijakan-			Sosialisasi terkendala dengan kondisi	Belum semua OPD memahami sistem	Peningkatan kualitas pengadaan yang taat	PBJ



No	Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD	Prioritas Lima Tahun ke Depan	Bagian
				Internal	Eksternal			
		kebijakan baru terkait pengadaan BMD			pandemi yang tidak memungkinkan acara sosialisasi secara luring	pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan	prosedur dan meminimalkan sengketa/permasalahan hukum	

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dapat dibagi menjadi tiga isu utama, yaitu:

- 1) Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum optimalnya pengelolaan batas wilayah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten lain yang berbatasan dengan Kab.Grobogan.
 - b. Rancangan produk hukum daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Belum Optimalnya kinerja BUMD.
 - b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan.
 - c. Belum semua OPD memahami sistem pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan.
- 3) Isu terkait pelayanan publik.
 - a. Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara menyeluruh (komprehensif) di semua perangkat daerah.
 - b. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
 - c. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang



berkualitas, dan meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2026 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Tahun 2026 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2026 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Grobogan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel II.5.



Tabel II. 5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Sekretariat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Setda Grobogan	Skor	BB (73)	40.612.616.802	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Setda Grobogan	NILAI SAKIP	BB (73)	58.248.383.521	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda Grobogan	Skor	BB (73)	292.966.898	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda Grobogan	Meningkatnya Nilai Sakip Setda	BB (73)	214.410.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setda Grobogan	Dokumen	2	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	173.620.000	
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda Grobogan	Laporan	1	38.421.748	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	40.790.000	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Setda Grobogan	Dokumen	1	30.909.030	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Setda Grobogan	Dokumen	1	30.909.030	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	0	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Setda Grobogan	Dokumen	1	30.909.030	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Setda Grobogan	Dokumen	1	30.909.030	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0	
1.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setda Grobogan	Laporan	1	30.909.030	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	0	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen	100	14.406.579.183	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	17.875.843.000	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Setda Grobogan	Orang/bulan	114	14.221.125.003	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Setda Grobogan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	17.875.843.000	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Setda Grobogan	Dokumen	-	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	0	
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Setda Grobogan	Dokumen	12	30.909.030	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	0	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Setda Grobogan	Laporan	1	30.909.030	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Setda Grobogan	Dokumen	3	30.909.030	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	0	
1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Setda Grobogan	Laporan	2	30.909.030	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	0	
1.2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Setda Grobogan	Dokumen	2	30.909.030	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	0	
1.3	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda Grobogan	Persen	100	1.110.817.300	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda Grobogan	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	100	1.540.645.171	
1.3.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda Grobogan	Orang/bulan	24	796.706.202	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda Grobogan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	990.645.171	
1.3.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda Grobogan	Paket	2	64.111.098	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda Grobogan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	400.000.000	
1.3.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda Grobogan	Orang	2	250.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda Grobogan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	150.000.000	



No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Setda Grobogan	Persen	100	361.120.501	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Setda Grobogan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100	376.678.000	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setda Grobogan	Paket	1	154.545.150	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setda Grobogan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	226.678.000	
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Setda Grobogan	Orang	452	154.545.150	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Setda Grobogan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	150.000.000	
1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Setda Grobogan	Orang	35	52.030.201	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Setda Grobogan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	100	8.163.559.323	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	15.013.395.000	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Setda Grobogan	Paket	12	114.466.441	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Setda Grobogan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	150.000.000	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda Grobogan	Paket	12	74.689.093	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda Grobogan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	200.312.000	
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Setda Grobogan	Paket	2	272.667.388	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Setda Grobogan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	263.000.000	
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setda Grobogan	Paket	112	4.162.398.974	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setda Grobogan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	206	7.001.081.800	
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Setda Grobogan	Paket	16	278.881.562	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Setda Grobogan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	420.000.000	
1.5.6	Penyediaan Bahan/Material	Setda Grobogan	Paket	15	416.241.604	Penyediaan Bahan/Material	Setda Grobogan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	409.559.000	
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setda Grobogan	Laporan	2360	2.740.153.860	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.620	6.464.442.200	
1.5.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Setda Grobogan	Dokumen	100	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	
1.5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Setda Grobogan	Dokumen	1	104.060.401	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	105.000.000	



No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	100	4.662.365.496	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	8.835.540.600	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setda Grobogan	Unit	12	4.175.704.553	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setda Grobogan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	15	7.000.000.000	
1.6.2	Pengadaan Mebel	Setda Grobogan	Unit	20	226.697.665	Pengadaan Mebel	Setda Grobogan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23	565.508.600	
1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setda Grobogan	Unit	66	259.963.278	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setda Grobogan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	82	1.270.032.000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100	4.021.102.276	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	4.555.594.000	
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setda Grobogan	Laporan	12	1.922.828.350	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.200.000.000	
1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda Grobogan	Laporan	12	312.181.203	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	600.000.000	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setda Grobogan	Laporan	12	1.786.092.723	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.755.594.000	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100	4.923.137.059	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	7.826.166.350	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setda Grobogan	Unit	34	832.482.167	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setda Grobogan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27	1.945.329.500	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setda Grobogan	Unit	265	260.024.049	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setda Grobogan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	332	290.917.000	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setda Grobogan	Unit	5	3.659.220.037	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setda Grobogan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	5.449.999.850	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda Grobogan	Unit	5	87.575.585	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda Grobogan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0	
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda Grobogan	Unit	44	83.835.221	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda Grobogan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200	139.920.000	
1.9	Penataan Organisasi		Persen	97	1.543.297.523	Penataan Organisasi		Prosentase Perangda yang mengimplementasikan dengan baik	98	1.360.111.400	
1.9.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Setda Grobogan	Dokumen	3	326.780.877	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4	230.000.000	
1.9.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Setda Grobogan	Laporan	1	258.415.483	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4	198.060.000	
1.9.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Setda Grobogan	Dokumen	5	654.918.626	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12	596.629.800	
1.9.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Setda Grobogan	Dokumen	1	130.163.679	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	188.030.000	
1.9.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Setda Grobogan	Dokumen	49	173.018.858	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	50	147.391.600	
1.10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persen	100	1.127.671.243	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Terfasilitasinya kebutuhan kedinasan bagi unsur pimpinan daerah dibidang keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi	100	650.000.000	
1.10.1	Fasilitasi Keprotokolan	Setda Grobogan	Laporan	13	514.010.409	Fasilitasi Keprotokolan	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	150.000.000	
1.10.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Setda Grobogan	Laporan	15	513.381.988	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	18	150.000.000	
1.10.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Setda Grobogan	Laporan	12	100.278.846	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	15	350.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Predikat (rendah/ sedang/ tinggi)	tinggi	16.479.902.247	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Status Kinerja LPPD	tinggi	15.487.043.800	
2.1	Administrasi Tata Pemerintahan		Persen	100	680.485.887	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase terselenggaranya administrasi tata kelola pemerintahan yang baik	100	742.205.800	
2.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Setda Grobogan	Dokumen	2	37.149.563	Penataan Administrasi Pemerintahan	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	229.140.800	
2.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Setda Grobogan	Dokumen	2	225.005.019	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	214.540.000	
2.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Setda Grobogan	Dokumen	3	425.136.167	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	298.525.000	
2.2	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persen	84	319.393.310	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Terselenggaranya Kerjasama Daerah yang baik	83	61.810.000	
2.2.1	Kerjasama Daerah Dalam Negeri	Setda Grobogan	Dokumen	24	77.272.575	Kerjasama Daerah Dalam Negeri	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10	61.810.000	
2.2.2	Kerjasama Daerah Luar Negeri	Setda Grobogan	Dokumen	1	164.848.160	Kerjasama Daerah Luar Negeri	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	0	0	
2.2.3	Evaluasi Kerjasama Daerah	Setda Grobogan	Laporan	25	77.272.575	Evaluasi Kerjasama Daerah	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0	0	
2.3	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Kegiatan	9	14.773.515.011	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9	14.094.800.000	
2.3.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Setda Grobogan	Dokumen	6	11.381.145.939	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4	13.654.800.000	
2.3.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Setda Grobogan	Dokumen	2	3.236.278.471	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2	125.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Setda Grobogan	Dokumen	2	156.090.601	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2	315.000.000	
2.4	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persen	93	699.703.177	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Terlaksananya kajian, pelayanan dan informasi hukum	93	588.228.000	
2.4.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Setda Grobogan	Dokumen	27	145.684.561	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Setda Grobogan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	25	131.256.000	
2.4.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Setda Grobogan	Kasus	2	491.582.375	Fasilitasi Bantuan Hukum	Setda Grobogan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	305.546.000	
2.4.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Setda Grobogan	Dokumen	27	62.436.241	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Setda Grobogan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	25	151.426.000	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persen	100	3.088.410.628	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten	100	2.264.572.500	
3.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persen	100	518.023.471	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian	100	790.000.000	
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Setda Grobogan	Dokumen	6	218.526.842	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5	470.000.000	
3.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Setda Grobogan	Laporan	2	62.436.241	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6	60.000.000	
3.1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Setda Grobogan	Dokumen	8	237.060.388	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	260.000.000	
3.2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		persen	100	468.271.803	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Prosentase terfasilitasinya OPD dalam tertib administrasi pembangunan	100	450.000.000	
3.2.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Setda Grobogan	Dokumen	48	169.817.209	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	48	102.217.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Setda Grobogan	Laporan	4	183.923.636	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	208.589.400	
3.2.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Setda Grobogan	Laporan	1	114.530.958	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Setda Grobogan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	139.193.600	
3.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		persen	100	624.359.700	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang baik dan sesuai ketentuan di Kabupaten Grobogan	100	724.572.500	
3.3.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Setda Grobogan	Dokumen	12	241.266.329	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	225.000.000	
3.3.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Setda Grobogan	Dokumen	12	231.917.334	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	300.000.000	
3.3.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Setda Grobogan	Orang	12	151.176.037	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Setda Grobogan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	23	199.572.500	
3.4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		persen	100	1.477.755.654	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase Kebijakan Bidang SDA yang terimplementasi	100	300.000.000	
3.4.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Setda Grobogan	Dokumen	2	1.425.725.454	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	7	300.000.000	
3.4.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Setda Grobogan	Dokumen	2	52.030.200	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Setda Grobogan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	0	0	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Grobogan selain mengacu pada RPJMD juga merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah melalui arah kebijakan pembangunan tahunan yang dalam perumusan dan penyusunannya melibatkan berbagai unsur masyarakat, meliputi LSM, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok usaha dan DPRD.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu Rembug Warga, Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2026, tidak ada usulan khusus masyarakat yang masuk, namun ada bentuk usulan lain yakni melalui mekanisme pikir (pokok pikiran) DPRD yang menjadi sarana penyampaian usulan masyarakat melalui perwakilannya di DPRD berupa hibah untuk lembaga keagamaan dan lembaga sosial (pondok pesantren, TPQ, madin, sekolah minggu, tempat ibadah, bantuan ke BAZNAS, dll.).

Tabel II. 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

NO	URAIAN PEKERJAAN	USULAN PERMASALAHAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
1	Mushola Al Muhtakim RT 6 RW 2 Desa Penadaran Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
2	Masjid Al Istiqomah Dusun Dongko Desa Depok Kec. Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	100,000,000
3	Mushola Al Iman RT 01 RW 01 Desa Guyangan Kec Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
4	Mushola Umar Bin Abdul Aziz Dusun Galeh RT 4 RW 4 Desa Werdoyo Kec Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
5	TPQ Miftahul Jannah Dusun Sendang RT 02 RW 05 Desa Sendangharjo Kec Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000



NO	URAIAN PEKERJAAN	USULAN PERMASALAHAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
6	Masjid Jami Darussalam Dusun Payaman RT 02 RW 02 Desa Nampu Kec Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
7	Masjid Baitul Hamid RT 002 RW 005 Dusun Ngrapah Desa Sambirjo Kec. Wirosari	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
8	Masjid Darus Salam RT 05 RW 04 Kedungwatu Desa Sambirejo Kec. Wirosari	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
9	Masjid Awwalul Islam Dusun Randutelu RT 06 RW 05 Desa Tambahrejo Kec. Wirosari	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
10	Masjid Darrussalam RT 02 RW 03 Bulu Desa Kropak Kec Wirosari	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
11	Madin Miftahuddurus Desa Sarirejo Kecamatan Ngaringan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
12	Madin Ula Miftahul Ulum 02 Klatak Desa Tlogomulyo Kec. Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
13	TPQ Nurul Hikmah Desa Kaliwenang Kec Tanggungharjo	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
14	Mushola Al-Istiqomah Dusun Kaliwenang RT 04/01 Desa Kaliwenang Kec. Tanggungharjo	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
15	Mushola Al-Hikmah Dusun Karanghari RT 02/04 Desa Sugihmanik Kec. Tanggungharjo	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
16	Masjid Jami' Baiturrahim Dusun Ngambak Kulon RT 08/01 Desa Ngambakrejo Kec. Tanggungharjo	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
17	Mushola Darut Taqwa Dusun Mrisi RT 03 RW 04 Desa Mrisi Kecamatan Tanggungharjo	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
18	TPQ Nurul Arifin Dusun Bogoraji Desa Karangharjo Kecamatan Pulokulon	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
19	Madin Ula Miftahul Ulum III Dusun Karangpung Desa Pojok Pulokulon	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
20	Madin Riyadut Tolibin Dusun Trembes RT03/ RW04 Desa Sidorejo, Kec. Pulokulon	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
21	Masjid Al Huda Kalisari Desa Temurejo Kec. Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
22	Masjid At Taqwa Dukuh Dangi Desa Harjowinangun Kec. Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
23	Madin Miftahul Ulum Desa Wanutunggal Kec. Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
24	Madin Al Irsyad Desa Rajek Kec. Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	40,000,000



NO	URAIAN PEKERJAAN	USULAN PERMASALAHAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
25	Ponpes Tahfidzul Qur'an Mojoagung Kec Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
26	TPQ Roudhotul Jannah Desa Pangkalan Kec. Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
27	Madin Nurul Huda Dusun Pateh Desa Mojorebo Kec. Wirosari	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
28	Masjid Darul Mujahidin Dusun Krajan Desa Pendem Kecamatan Ngaringan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	25,000,000
29	Masjid Al Huda Dusun Geneng Desa Pendem Kecamatan Ngaringan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
30	Ponpes Al Kuttab Desa Bandungsari Kecamatan Ngaringan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	100,000,000
31	Masjid Baiturrohman Dusun Kayut Desa Kalanglundo Kec. Ngaringan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
32	Mushola Miftakhul Jannah Dusun Semen Desa Truwolu Kec. Ngaringan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
33	Madin Arrohman Ds. Sumberagung RT 05 RW 01 Kec. Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
34	Masjid Nurul Huda Dusun Krajan Barat RT 3 RW 2 Desa Tanjungharjo Kec. Ngaringan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
35	Mushola Majelis Sujud Dusun Ketro Barat Desa Ketro Kecamatan Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
36	Mushola Makanul Huda Dusun Jamus Desa Mangin Kecamatan Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
37	Mushola Al Ihsan Dusun Sendangrejo Desa Jipang Kecamatan Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
38	Mushola Al Huda Dusun Jamus Desa Mangin Kecamatan Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
39	Mushola Baiturohman Dusun Tunggu Desa Tunggu Kecamatan Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
40	Mushola Nurul Huda Kp. Bukit Kencana Dusun Kedungwungu Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
41	Mushola Al-Hikmah Desa Tanjungsari Kec Kradenan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
42	Mushola Al Fatah RT 2 RW 1 Desa Panunggalan Kec Pulokulon	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
43	Masjid Al-Huda Balong Desa Keyongan Kec Gabus	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000



NO	URAIAN PEKERJAAN	USULAN PERMASALAHAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
44	Madin Mamba'ul Ulum Dusun Ketanggan Desa Katong Kecamatan Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
45	Masjid Nurul Huda Dusun Ande Ande Desa Ngembak Kec Purwodadi	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
46	TPQ Mirza Dusun Tanjungan Desa Ngembak Kec Purwodadi	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
47	Gereja Isa Al Masih Jl Glugu No 16 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
48	Masjid Baitul Karim Desa Manggarwetan Kec. Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
49	Mushola Maslahul Huda RT 03 RW 05 Dusun Brakas Desa Terkesi Kec. Klambu	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	22,000,000
50	Mushola Roudlotul Muttaqin Desa Tungu RT 05 RW 01 Kec. Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
51	Mushola Al Mubarak RT 05 RW 02 Desa Manggarwetan Kec. Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
52	Mushola Baitussalam Dusun Lekok RT 06 RW 02 Desa Penawangan Kec. Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
53	Mushola Al Mujahidin Dusun Goleng RT 04 RW 04 Desa Terkesi Kec. Klambu	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
54	Madin Asrorul Islam Walisongo Dusun Tumbal Desa Kluwan Kec. Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	35,000,000
55	TPQ Assalafiyah Desa Wandankemiri RT 03 RW 01 Kec. Klambu	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
56	Mushola Al Iman Dusun Pokol Mangunan Desa Karang Sari Kec. Brati	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
57	Masjid Baitul Jalal Dusun Goleng Desa Terkesi Kec. Klambu	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
58	Masjid Jami Baitut Taqwa Desa Jenengan Kec. Klambu	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
59	Masjid Baitul Mubarakah Dusun Brangkal RT 07 RW 07 Desa Karanganyar Kec. Purwodadi	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
60	Madin Tarbiyatus Shibyan Dusun Langgar Desa Lajer Kecamatan Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	100,000,000
61	Mushola Ar-Ridho Desa Tungu RT 10 RW 02 Kecamatan Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
62	Mushola Miftahul Mujib Desa Tungu RT 14 RW 02 Kecamatan Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
63	Mushola Al Mubarak Desa Tungu RT 02 RW 01 Kecamatan Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000



NO	URAIAN PEKERJAAN	USULAN PERMASALAHAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
64	Mushola Al Muttaqin Desa Tungu RT 13 RW 02 Kecamatan Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
65	Mushola Nurul Huda Desa Manggarwetan Kecamatan Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
66	Mushola Assalam Desa Manggarwetan Kecamatan Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
67	TPQ Riyadlul Qur'an Dusun Menawan RT.01 RW.03 Desa Menawan Kecamatan Klambu	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	25,000,000
68	TPQ Al Karomah Dusun Pungkruk RT 01/04 Desa Bologarang Kec Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
69	TPQ Futuhiyyah Desa Kramat RT 001/002 Kec Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
70	TPQ Nurul Fattah Ds. Karangwader RT. 05 RW. 02 Kec Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	35,000,000
71	TPQ Al Fattah I Dusun Jepang RT 01/ RW 05 Desa BologarangKec Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
72	Madin Miftahul Ulum I Jln Kauman RT 03/ RW 01 Desa LajerKec Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
73	Madin Al Barokah RT 01/ RW 04 Desa Kluwan Kec Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
74	Masjid Baitul Mu'min Dusun Randulawang RT 02/02 Desa Karangsono Kec Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
75	Masjid Darussalam Dusun Karangasem RT 06/06 Desa Karangsono Kec Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	25,000,000
76	Madin Miftahul Islam I Dusun Duwari RT 002 RW 003 Desa Pengkol Kec Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
77	Mushola Nurul Hidayah Desa Leyangan RT 003 RW 002 Kec. Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
78	TPQ Al Fatah Dusun Krajan RT 003 RW 002 Desa Pengkol Kec. Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
79	Masjid Jami' Al Amin Raden Ronggo Djati Desa Kluwan RT 007 RW 001 Kec. Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
80	Mushola Darussalam Desa Ngeluk RT 10 RW 001 Kec. Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
81	Ponpes Riyadhul Khoirot Jl P Puger Gang Kauman RT 03 RW 01 No 09 Kelurahan Grobogan Kec. Grobogan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	100,000,000
82	Mushola Nurul Islam RT 01/05 Karanganyar Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
83	Madin Ushuluddin RT 03 RW 07 Drojo Bangsri Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	40,000,000



NO	URAIAN PEKERJAAN	USULAN PERMASALAHAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
84	Mushola Al Ikhlas RT 04 RW 05 Ngasem Monggot Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
85	Mushola Darussalam Dusun Krajan Lor RT 3 RW 3 Desa Tuko Kec Pulokulon	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
86	Mushola Baitul Iman Dusun Pilanglengkung RT 1 RW 3 Desa Bago Kec Kradenan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	7,500,000
87	Mushola Al Mudzakkirin Dusun Banjarbanggi RT 2 RW 3 Desa Pandanharum Kec Gabus	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
88	Mushola Al Istikomah Dusun Banjarbanggi RT 3 RW 3 Desa Pandanharum Kec Gabus	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	7,500,000
89	Mushola Al Kozin Dusun Banjarbanggi RT 4 RW 1 Desa Pandanharum Kec Gabus	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	7,500,000
90	Masjid Baitul Amin Dusun Tengger RT 3 RW 2 Desa Tunggulrejo Kec Gabus	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	7,500,000
91	Mushola Annur Dusun Sambongbangi RT 2 RW 1 Desa Sambongbangi Kec Kradenan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	7,500,000
92	Mushola Miftahul Falaq Dusun Banjarsari RT 2 RW 2 Desa Banjarsari Kec Kradenan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
93	Mushola Al Barkah Dusun Ngrandu RT 4 RW 4 Desa Rejosari Kec Kradenan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
94	Masjid Baitul Muttaqin Dusun Banjar Lor RT 3 RW 1 Desa Banjarsari Kec Kradenan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	7,500,000
95	Masjid Darul Hikmah Dusun Sindu RT 8 RW 6 Desa Sindurejo Kec Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	7,500,000
96	Mushola Darul Hikmah Dusun Sindu RT 4 RW 6 Desa Sindurejo Kec Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	7,500,000
97	Mushola Al Mutaqin Dusun Ngesrep RT 02 RW 08 Desa Sulursari Kec Gabus	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	7,500,000
98	Ponpes ASSALAM Dusun Grompol RT 5 RW 7 Desa Kradenan Kecamatan Kradenan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	100,000,000
99	Madin Al Arifiyah Dusun Plosorejo RT 3 RW 2 Desa Pakis Kecamatan Kradenan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
100	Madin Wustho Baitussalam Dusun Grompol Desa Kradenan Kecamatan Kradenan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	48,000,000
101	TPQ Al Mubarak Dusun Kedungjati RT 1 RW 2 Desa Banjarejo Kecamatan Gabus	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	7,500,000
102	Madin Sirojuddin Dusun Sidorejo Desa Sidorejo Kec Pulokulon	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	7,500,000
103	Madin Nurul Wahid Wustha. Jl. Raya Kuwu-Sragen KM 07 Bentulan Desa Simo Kec Kradenan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000



NO	URAIAN PEKERJAAN	USULAN PERMASALAHAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
104	Madin Darul Huda Dusun Tegalwarung Desa Kalisari Kec Kradenan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
105	TPQ Al Ihsan Dusun Sanggrak Desa Kalisari Kec Kradenan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
106	TPQ NU Baitussalam 11 Dusun Kalitengah Desa Rejosari Kec Kradenan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
107	TPQ ASSALAM Dusun Grompol Desa Kradenan Kecamatan Kradenan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	100,000,000
108	Madin Al Huda Dusun Sembung RT 2 RW 7 Desa Mangunrejo Kec Pulokulon	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
109	Madin Tsamrotul Huda Dusun Lodran Desa Karangharjo Kec Pulokulon	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
110	Mushola Darul Hidayah Dusun Sadang Desa Karangrejo Kec. Gabus	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
111	Mushola Nur Hidayah RT. 1 RW. 4 Dusun Taruman Desa Taruman Kec. Klambu	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
112	Madin Miftahul Falah RT 1 RW 2 Desa Harjowinangun Kec. Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	25,000,000
113	Madin Nurul Ulum RT 4 RW 4 Desa Harjowinangun Kec. Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
114	TPQ Anshor Dusun Waruk Desa Dorolegi Kec. Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
115	TPQ Mambaul Furqon Dusun Jowan Desa Dorolegi Kec. Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
116	TPQ Nurul Dholam RT 4 RW 7 Desa Pojok Kec. Tawangharjo	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
117	TPQ Ar Rouf RT 4 RW 12 Kelurahan Kuripan Kec. Purwodadi	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
118	Masjid Baitur Rozaq Dusun Saban RT01/RW04 Desa Papanrejo Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
119	Madin Miftahul Huda Dusun Saban RW01/RW04 Desa Papanrejo Kec.Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
120	Masjid Nururrohman Dusun Pilang Kidul RT04/RW05 Desa Gubug Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
121	TPQ Al-Islah Dusun Ngombak RT01/RW01 Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
122	Ponpes Putra - Putri Nurul Qur'an Dusun Krajan RT06/RW01 Desa Gingsangtani Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
123	Mushola Al-Amin Desa Ngroto RT 01/RW 05 Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000



NO	URAIAN PEKERJAAN	USULAN PERMASALAHAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
124	Mushola Nurul Huda Desa Ngroto RT02/RW01 Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
125	TPQ Zumrotus Sholihin Krajan Desa Papanrejo Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	70,000,000
126	Mushola Al-Amin Dusun Klatak RT01/RW02 Desa Tlogomulyo Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
127	Mushola Al- Ma'aruf RT01/RW06 Desa Gubug Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
128	Mushola Baitul Muttaqin Dusun Saban RT04/RW04 Desa Papanrejo Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
129	Ponpes Arohmah Desa Kunjeng RT02/RW01 Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
130	Madin Robithotus Salafiyah RT03/RW02 Desa Ngroto Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
131	Masjid Baitul Jalil Dusun Krajan RT03/RW02 Desa Papanrejo Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
132	Mushola Al Hidayah Dusun Satreyan RT.003 RW.007 Desa Kronggen Kec. Brati	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
133	Madin Nurul Ulum Ploso Dusun Ploso RT.003 RW.001 Desa Kandangrejo Kec. Klambu	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
134	Mushola Nurul Hidayah Dusun Pagergunung RT.008 RW 002 Desa Katekan Kec.Brati	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
135	Mushola As Syahid Dusun Kalisari Desatemurejo Kec. Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
136	Mushola "Al Hidayah" Dusun Tumbal RT.007 RW.003 Desa Kluwan Kec. Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
137	Mushola Al Hadi Dusun Tumbal RT.008 RW.003 Desa Kluwan Kec. Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
138	Mushola Miftahul Jannah Desa Jangkungharjo RT.008 RW 001 Kec.Brati	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
139	Mushola "Miftahul Huda" Dusun Karangasem RT.006 RW.001 Desa Karangsono Kec. Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
140	Mushola Huda Al Muttaqim Dusun Ploso RT.003 RW.007 Desa Nampu Kec Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
141	Mushola Baitul Izzah Dusun Gunungtugel RT.05 RW.03 Desa Sendangharjo Kec. Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
142	Mushola Mambaul Hikmah Dusun Sendang RT.009 RW.006 Desa Sendangharjo Kec. Karangrayung	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000



NO	URAIAN PEKERJAAN	USULAN PERMASALAHAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
143	TPQ "Miftahul Hidayah" Dusun Mayang RT.003 RW.005 Desa Kronggen Kec. Brati	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
144	TPQ Roudhotul Atfal Dusun Kebonagung RT 02 RW 09 Desa Jumo Kec. Kedungjati	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
145	TPQ Roudhotul Athfal 3 Dusun Ngawurejo RT 01 RW 05 Desa Kentengsari Kecamatan Kedungjati	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
146	Madin Al Huda 1 RT 01 RW 07 Desa Jumo Kec. Kedungjati	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
147	Ponpes Miftahul Qur'an Dusun Tamban Desa Wates Kec. Kedungjati	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
148	Mushola Ibnu Sujak Dusun Lukas RT 03 RW 02 Desa Kalimaro Kec. Kedungjati	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
149	Mushola Arrahman Dusun Dawung RT 03 RW 02 Desa Jumo Kec. Kedungjati	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
150	Madin Ar Rohmat Kedungjago RT.03 RW.06 Desa Kedungrejo Kecamatan Purwodadi	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
151	Ponpes Hidayatul Qur'an Dusun Cumpleng RT.001 RW.008 Desa Putat Kecamatan Purwodadi	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
152	Madin Al Hidayah Lengkong Desa Sobo Kecamatan Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
153	Masjid Aisyah RT.06 RW.06 Desa Suru Kecamatan Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
154	Masjid Al Ma'uun Dusun Depok Timur RT.07 RW.03 Desa Depok Kecamatan Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
155	Mushola Al Muttaqin RT. 01 RW.03 Desa Sindurejo Kecamatan Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
156	Mushola Al Mubarakah Dusun Godongan RT.05 RW.01 Desa Sugihan Kecamatan Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
157	Mushola Baitunnajah RT.03 RW.13 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
158	TPQ Darul Muttaqin Dusun Tunggak 2 RT.03 RW.04 Desa Tunggak Kecamatan Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	25,000,000
159	Mushola Al Ihlas Dusun Mintreng RT 04 RW 05 desa Baturagung Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
160	Madin Fathul Himam Desa Ringinharjo RT 02 RW 03 Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	25,000,000
161	TPQ Al Ikram Dusun Karang Malang RT 02 RW 03 Desa Ringinkidul Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
162	Madin Miftahul Huda Dukuh Kuniran RT 02 RW 02 Desatrisari Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000



NO	URAIAN PEKERJAAN	USULAN PERMASALAHAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
163	Mushola Darul Ghofar Desa Tambakan RT 02 RW 04 Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
164	Mushola wildanul Yaum RT 01 RW 01 Desa Pranten Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
165	Masjid Darunnajah Desa Baturagung ,Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
166	TPQ Sirojul Abidin Dusun Bantengan RT 02 RW 01 Desa Tlogo mulyo ,Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	13,000,000
167	Mushola Baitul Muttaqin RT 03 RW 03 Desa Kuwaron Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
168	Madin Hidayatus Sibyan 7 Dsn Medang Banjarejo Kec Gabus	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
169	Madin Hidayatus Sibyan 4 Dsn Kuwojo Banjarejo Kec Gabus	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
170	Madin Hidayatus Sibyan 3 Dsn Ngrunut Desa Banjarejo Kec Gabus	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
171	Madin Hidayatus Sibyan 5 Dsn Peting Desa Banjarejo Kec Gabus	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
172	Madin Tarbiyatus Sa'adah Dsn Boto Ds Gabus Kec Gabus	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
173	Mushola At Taqwa Dusun Ngencar RT 004 RW 003 Desa Suwatu Kec Gabus	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
174	Masjid Darussalam Dusun Ngancar RT 02 RW 04 Desa Kenteng Kec. Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
175	Masjid Az Zamzamy Majenang RT.03RW.19 Kel Kuripan Kec Purwodadi	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	100,000,000
176	Masjid Mahir Bin Ibrohim 2 Dusun Nonang Ds. Kranggan Kecamatan Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	75,000,000
177	Mushola Al Huda RT.03/08 Jetis, Desa Nambuhan Kec Purwodadi	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
178	TPQ Nurudh Dholam Dusun Widuri RT 002 RW 008 Desa Cingkrong Kec Purwodadi	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
179	Mushola Nurul Falah Dusun Bopong RT.002 RW.005 Desa Kandangan Kec Purwodadi	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
180	Madin Hidayatutholibin Dusun Gandok RT 003 RW 003 Desa Genengadal Kec. Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
181	Madin Wustho Mamba'ul Ulum Desa Genengadal Kec. Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
182	Mushola Djamiatul Muslimin Dusun Mungkli RT.002 RW 012 Desa Kandangan Kec Purwodadi	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000



NO	URAIAN PEKERJAAN	USULAN PERMASALAHAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
183	Mushola At Taqwa Dusun Mungkli RT.001 RW.012 Desa Kandangan Kec Purwodadi	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
184	Masjid Al Ikhlas Dusun Sumurgung RT.002 RW.008 Desa Pilangpayung Kec Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
185	Madin Roudlotut Tholabah Desa Karangasem Kec Wirosari	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	100,000,000
186	Mushola Al Manshurin RT 1 RW 8 Teges Desa Tegalrejo Wirosari	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
187	Mushola Al Ghozali Dusun Srunggo RT 03 RW 05 Desa Klambu, Kec. Klambu.	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
188	Mushola Al Amin Dusun Kuniran RT 05 RW 03 Desa Klambu, Kec. Klambu.	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
189	Mushola Nurul Huda Dusun Latak RT 03 RW 03 Desa Latak, Kec. Godong.	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
190	Mushola Al Ishlah Dusun Latak RT 04 RW 05 Desa Latak, Kec. Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
191	Mushola Alfalah Jl Bima IV RT 03 RW 01 Dusun Krajan Desa Kramat Kec. Penawangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
192	Masjid Masjidil Rohmah Dusun Telomangkurejo RT 01 RW 08 Desa Taruman Kec. Klambu	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
193	Mushola Arrohman Dusun Jentir RT.001 RW.003 Desa Godan Kec. Tawangharjo	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
194	Masjid Baitul Mukmin RT.010 RW.003 Dusun Tarub Desa Tarub Kec. Tawangharjo	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
195	Ponpes Nurul Dzolam Dusun Kauman RT.003 RW.008 Desa Selo Kec. Tawangharjo	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
196	Mushola Al Huda Dusun Selo Krajan RT.001 RW.001 Desa Selo Kec. Tawangharjo	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
197	Mushola Al Faqih Dusun Kauman RT.005 RW.008 Desa Selo Kec. Tawangharjo	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
198	Madin Al Ihsan Dusun Pancan RT.003 RW.006 Desa Getasrejo Kec. Grobogan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
199	Ponpes Miftahul Ulum Dusun Krajan RT.004 RW.006 Desa Karangrejo Kec. Grobogan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
200	Madin Habibiyah Dusun Jatisari RT.001 RW.002 Tambakselo Kec. Wirosari	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	30,000,000
201	Ponpes Miftahut Thullab Jl. Komplek Masjid K.H Moh Ilyas RT 02 RW 01 Desa Putatsari Kec. Grobogan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	100,000,000



NO	URAIAN PEKERJAAN	USULAN PERMASALAHAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
202	TPQ An Nur Pondok Bintoro Dusun Pondok Bintoro Desa Karangrejo Kec. Grobogan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
203	TPQ Durrotul Qur an Dusun Ngrumpeng Desa Putatsari Kec. Grobogan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
204	Madin Tarbiyatus Shibyan Dusun Ngrumpeng Desa Putatsari Kec. Grobogan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	100,000,000
205	TPQ Nurul Hidayah Dusun Tunggul 03/05 Desa Lebak Kec. Grobogan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
206	TPQ Baitul Karim Desa Teguhan Kec. Grobogan Kab. Grobogan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	35,000,000
207	TPQ Syifa'ul Qolbi Dusun Pojok RT/RW. 01/07 Desa Putatsari Kec. Grobogan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
208	Madin Al Musthofa Dsn. Celeb, Desa Teguhan, Kec. Grobogan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
209	Madin Al Huda Dusun. Pancur, Desa Lebeng Jumuk, Kec. Grobogan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
210	Madin Attaqwa Dsn. Teguhan, Desa Teguhan, Kec. Grobogan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
211	TPQ Al Hamidiyah Dsn. Turi, Desa Putatsari Kec. Grobogan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	10,000,000
212	Madin Al Miftah Dusun Krajan Barat RT 01 RW 02 Desa Tanjungharjo Kec. Ngarangan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
213	Ponpes Iatanul Mubtadiin, Dsn. Blado, Desa Teguhan, Kec. Grobogan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	25,000,000
214	Masjid Al-Ahbab Jl. Pemuda No.29B Pilang Kidul Desa Gubug Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	45,000,000
215	Masjid Jami' Baiturohim Desa Curug Kecamatan Tegowanu	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	90,000,000
216	Mushola Ar Rosyid Dukuh Blumbang RT 03 RW 09 Desa Kuwaron Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
217	Mushola Al Hadi Kampung Mekarsari RT 03 RW 07 Desa Kuwaron Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
218	Mushola Al Hijrah Desa Gubug RT 01 RW 10 Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
219	Mushola As-Salam Gubug Timur RT 02 Dan 04 RW 10 Desa Gubug Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
220	Mushola Baitus Salam Kp. Ngemplak RT 01 RW 01 Desa Rowosari Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
221	Mushola Al Falah Desa Tajemsari RT 03 RW 02 Kecamatan Tegowanu	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000



NO	URAIAN PEKERJAAN	USULAN PERMASALAHAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
222	Mushola Ash Shobirin Desa Kemiri RT 01 RW 03 Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	15,000,000
223	TPQ Roudhotut Tholibin Desa Sukorejo RT 02 RW 05 Kecamatan Tegowanu	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
224	TPQ At Ta'awun Kampung Katonsari RT 04 RW 05 Desa Kuwaron Kec. Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
225	Masjid I'tikaf Al Hidayah Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	100,000,000
226	Mushola Nurul Busyro Desa Tlogomulyo RT 08 RW 03 Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
227	Mushola Baitul Syakur Desa Tlogomulyo RT 03 RW 05 Kecamatan Gubug	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
228	Madin Tarbiyatul Athfal II Desa Kemloko Kecamatan Godong	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	50,000,000
229	Ponpes Al Mu'thi Krajan Desa Sumberagung Kec. Ngaringan	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
230	Masjid Al Hidayah Dusun Sumberagung RT 04 RW 05 Desa Kenteng Kec. Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
231	Masjid Al Huda Dusun Sidomulyo RT 02 RW 06 Desa Kenteng Kec. Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
232	Masjid Nahdatul Ummah Dusun Ngacir RT 01 RW 03 Desa Kenteng Kec. Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
233	Masjid Al Muttaqin Dusun Domas RT 02 RW 10 Desa Kenteng Kec. Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
234	Mushola Jami' Nurul Hikmah Dsn. Jeblogan RT 02/ RW 09 Desa Kenteng Kecamatan Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
235	Masjid Nurul Iman Dusun Jeblogan RT 01 RW 09 Desa Kenteng Kec. Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
236	Masjid Al Hikmah Dusun Turi RT 01 RW 11 Desa Kenteng Kec. Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
237	Masjid Baitussolihin Dusun Welar RT 01 RW 02 Desa Kenteng Kec. Toroh	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	20,000,000
238	Masjid Arrohman Dusun Bancar RT 06 RW 02 Desa Sobo Kec Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000
239	Masjid Baitus Sholihin Grasak RT 02 RW 05 Desa Sobo Kec. Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000
240	Mushola Baitus Salam Grasak RT 03 RW 05 Desa Sobo Kec. Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000
241	Mushola Baitul Yaqin Sobo RT 01 RW 03 Desa Sobo Kec. Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000



NO	URAIAN PEKERJAAN	USULAN PERMASALAHAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
242	Mushola Baitul Mukmin Lengkong RT 04 RW 06 Desa Asemrudung Kec. Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000
243	Mushola Al Ikhlas Karangasem RT 01 RW 07 Desa Sobo Kec. Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000
244	Mushola Al Fatah Gilis RT 01 RW 01 Desa Sobo Kec. Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000
245	Mushola Miftahul Huda Bancar RT 10 RW 02 Desa Sobo Kec. Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000
246	Mushola Nurul Salam Karangasem RT 01 RW 07 Desa Sobo Kec. Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000
247	Masjid Roudlotul Mukminin Gemulung RT 05 RW 08 Desa Sobo Kec. Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000
248	Masjid Jamiul Yaqin Lengkong RT 02 RW 06 Desa Sobo Kec. Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000
249	Masjid Al Hilal Bancar RT 01 RW 02 Desa Sobo Kec. Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000
250	Mushola Al Ikhlas Bancar RT 02 RW 02 Desa Sobo Kec. Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000
251	Mushola Nurul Iman Karangasem RT 02 RW 07 Desa Sobo Kec. Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000
252	Mushola An Nur Karangasem RT 03 RW 07 Desa Sobo Kec. Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000
253	Mushola Miftahul Huda Dsn Bancar RT 10/ RW 02 Ds. Sobo Kecamatan Geyer	Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat	5,000,000
JUMLAH			6,085,500,000



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 terdapat 17 (tujuh belas) Program Prioritas yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia : peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk,beni dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan karyat yang membutuhkan;



14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritime untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Selain program 17 program prioritas, dijelaskan juga Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional sebagai berikut :



Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif



terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Pernyataan Visi Jangka Menengah OPD

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini, pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi Bupati/Wakil Bupati Grobogan yaitu sebagai berikut:

“Menuju Grobogan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Adapun penjelasan dari masing-masing kata pembentuk visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Maju

Maju sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti berjalan (bergerak) ke depan atau menjadi lebih baik. Maju dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dimaknai sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang cukup tinggi di kancah regional, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, dan inovatif dalam pelayanan dan penanganan permasalahan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan peningkatan produktivitas aktivitas ekonomi masyarakat yang ditandai peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita. Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha didukung pertumbuhan sektor-sektor utama penunjang perekonomian daerah, dan dari sisi



pengeluaran terutama didukung peningkatan investasi, peningkatan ekspor dan peningkatan konsumsi masyarakat.

Ekonomi yang berdaya saing diwujudkan dengan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah, ekonomi kreatif, dan hilirisasi berbasis riset dan teknologi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Daya saing ekonomi tersebut juga didukung dengan peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian daerah.

Modern dimaknai sebagai daerah dengan tingkat peradaban yang tinggi dengan pemanfaatan teknologi yang tinggi, dan memiliki infrastruktur yang didukung dengan teknologi terbaru. Inovatif adalah sebuah hal yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan (kreasi baru). Implementasi modern yaitu masyarakat memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan layanan terkini untuk memenuhi kebutuhannya.

Inovatif mengarahkan untuk menciptakan inovasi produk dan layanan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah. Implementasi inovatif akan mampu menciptakan inovasi produk dan layanan di berbagai sektor agar mampu berdaya saing tinggi di pasar regional, nasional maupun internasional.

2. Sejahtera

Sejahtera sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sejahtera dalam RPJMD Tahun 2025-2029 ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat tersebut mencakup pangan, perumahan layak, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial. Masyarakat diharapkan memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Sejahtera juga ditunjukkan dengan semakin meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat, meratanya pendapatan masyarakat, dan masyarakat merasakan kebahagiaan lahir dan batin.

3. Berkelanjutan

Berkelanjutan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berlangsung terus-menerus; berkesinambungan. Berkelanjutan dalam



RPJMD Tahun 2025-2029 dimaknai sebagai kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, menjaga kualitas udara dan air yang baik, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Implementasi berkelanjutan melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup termasuk tangguh bencana, sosial, serta ekonomi ke dalam strategi pembangunan, untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Keberlanjutan juga merupakan bentuk semangat dan komitmen dalam melanjutkan upaya pembangunan RPJMD periode sebelumnya, dengan terus meningkatkan hasil pembangunan yang sudah baik, memperbaiki serta menyempurnakan yang belum optimal, serta melaksanakan upaya pembaruan, dalam menangani permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Pernyataan Misi Jangka Menengah Perangkat Daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Menguatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan.

Misi ini akan menjadi payung dalam upaya untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.



2. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ini akan menjadi payung dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Kabupaten Grobogan. Melalui misi ini kemiskinan di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat menurun secara bertahap dengan berbagai strategi yang mengarah pada pengurangan pengeluaran penduduk miskin dengan penyediaan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan dan hunian yang layak; peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui pemberdayaan UMKM dan penyediaan akses pekerjaan yang layak; serta perlindungan sosial bagi penduduk miskin.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.

Misi ini akan menjadi payung dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat di Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya menyediakan akses pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, kuantitas dan kualitas penduduk yang terkendali, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

4. Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas.

Misi akan menjadi payung dalam upaya meningkatkan infrastruktur yang berkualitas. Pengembangan wilayah akan diwujudkan dengan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas baik, baik jalan, sarana permukiman, sanitasi, air bersih, maupun sarana perhubungan. Pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah juga dilakukan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan, sehingga risiko bencana semakin menurun.

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi.

Misi ini menjadi payung dalam upaya pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik. Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan reformasi birokrasi yang didukung



peningkatan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara, dan peningkatan transparansi melalui penggunaan teknologi informatika.

Tugas pokok Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Sekretaris Daerah selaras dan siap mendukung Misi ke 5: **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi.**

Untuk mencapai visi dan misi Bupati terpilih tahun 2025–2029 telah ditetapkan beberapa tujuan dan sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

Tabel III. 1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026
1.	Meningkatnya implementasi Reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik yang lebih berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	84.26
		Meningkatnya kualitas Pelayanan publik yang Modern berbasis teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik (IUP RPJPD)	Indeks	4.45
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan implementasi otonomi daerah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Angka	67.63
			Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98.93

Keterkaitan antara visi dan misi Kabupaten Grobogan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah:



Tabel III. 2
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Visi	Misi	Keterkaitan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah
Menuju Grobogan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi	a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Program dan Kegiatan

A. Penjabaran Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 menggunakan nomenklatur Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Sekretariat Daerah akan melaksanakan 3 program, 18 kegiatan, dan 56 sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Indikator program ini adalah NILAI SAKIP Kabupaten dengan target BB (73), Laporan Keuangan Setda Sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dengan target 100%, Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100%, dan Persentase



pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Setda (Strategis & Operasional) dengan target 100%. Program ini terdiri dari beberapa ke/giatan, yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2 sub kegiatan);
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, (1 sub kegiatan);
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dan sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan (3 sub kegiatan);
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material, sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (8 sub kegiatan);
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, sub kegiatan Pengadaan Mebel, sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (3 sub kegiatan);
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (3 sub kegiatan);



- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (4 sub kegiatan);
 - h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan *medical check up* untuk KDH/WKDH (3 sub kegiatan);
 - i. Kegiatan Penataan Organisasi, yang terdiri dari sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (5 sub kegiatan);
 - j. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (3 sub kegiatan).
- 2) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Indikator program ini adalah Status Kinerja LPPD atau nilai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dengan target 3,45. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:
- a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan, sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (3 sub kegiatan);



- b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, dan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (3 sub kegiatan);
 - c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, dan sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (3 sub kegiatan);
 - d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (1 sub kegiatan).
- 3) Program perekonomian dan pembangunan. Indikator program ini adalah persentase terlaksananya kebijakan perekonomian dengan target 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:
- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, yang terdiri dari sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan sub kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) (4 sub kegiatan);
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, sub kegiatan Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan, dan sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (3 sub kegiatan);
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri dari sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa, sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (3 sub kegiatan);



- d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, yang terdiri dari sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (1 sub kegiatan).



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Tahunan Ke-1

Program, kegiatan, dan sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, terdiri dari:
 - a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 1) Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Subkeg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - 1) Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - c. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 1) Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 2) Subkeg. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 3) Subkeg. Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1) Subkeg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
 - 2) Subkeg. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.



- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1) Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Subkeg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 4) Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 5) Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 6) Subkeg. Penyediaan Bahan/ Material.
 - 7) Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 8) Subkeg. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1) Subkeg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Subkeg. Pengadaan Mebel.
 - 3) Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 2) Subkeg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan;
 - 1) Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3) Subkeg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 4) Subkeg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



- i. Kegiatan Penataan Organisasi;
 - 1) Subkeg. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
 - 2) Subkeg. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
 - 3) Subkeg. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 4) Subkeg. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
 - 5) Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
- j. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
 - 1) Subkeg. Fasilitasi Keprotokolan.
 - 2) Subkeg. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.
 - 3) Subkeg. Pendokumentasian Tugas Pimpinan.
2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, terdiri dari:
 - a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan;
 - 1) Subkeg. Penataan Administrasi Pemerintahan.
 - 2) Subkeg. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.
 - 3) Subkeg. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
 - b. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah;
 - 1) Subkeg. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
 - c. Kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat;
 - 1) Subkeg. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.
 - 2) Subkeg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial.
 - 3) Subkeg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.
 - d. Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi hukum;
 - 1) Subkeg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - 2) Subkeg. Fasilitasi Bantuan Hukum.
 - 3) Subkeg. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
3. Program perekonomian dan pembangunan, terdiri dari:
 - a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian;
 - 1) Subkeg. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi



- Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.
- 2) Subkeg. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.
 - 3) Subkeg. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
- b. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan;
- 1) Subkeg. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.
 - 2) Subkeg. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.
 - 3) Subkeg. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
- c. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- 1) Subkeg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 2) Subkeg. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - 3) Subkeg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.
- 1) Subkeg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel IV.1.



Tabel IV. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja Penanggung Jawab
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
					Sekretariat Daerah			75.778.967.750,00		80.553.500.000,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			75.778.967.750,00		80.553.500.000,00	
4 01					SEKRETARIAT DAERAH			75.778.967.750,00		80.553.500.000,00	
4 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	56.171.806.500,00	-	62.515.500.000,00	Asisten Administrasi Umum
4 01 01 2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	157.978.000,00	-	225.000.000,00	
4 01 01 2.01 0001					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	122.072.000,00	3 Dokumen	180.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4 01 01 2.01 0007					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	35.906.000,00	1 Laporan	45.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4 01 01 2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	18.855.638.000,00	-	18.000.000.000,00	
4 01 01 2.02 0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	127 Orang/bulan	18.855.638.000,00	127 Orang/bulan	18.000.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja Penanggung Jawab
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.762.192.600,00	-	1.980.000.000,00	
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	199.197.600,00	4 Paket	230.000.000,00	Bagian Umum
4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.431.195.000,00	12 Dokumen	1.600.000.000,00	Bagian Umum
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	131.800.000,00	100 Orang	150.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	13.720.716.800,00	-	15.240.500.000,00	
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	131.815.400,00	12 Paket	150.000.000,00	Bagian Umum
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	226.077.000,00	2 Paket	200.500.000,00	Bagian Umum
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	231.116.500,00	3 Paket	280.000.000,00	Bagian Umum



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja Penanggung Jawab
			Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	206 Paket	6.152.340.600,00	206 Paket	7.010.000.000,00	Bagian Umum
4 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	369.083.300,00	4 Paket	430.000.000,00	Bagian Umum
4 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	359.908.100,00	3 Paket	420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2620 Laporan	6.127.048.600,00	2620 Laporan	6.600.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4 01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	123.327.300,00	2 Dokumen	150.000.000,00	Bagian Umum
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	6.755.426.600,00	-	10.400.000.000,00	
4 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	10 Unit	4.355.032.000,00	10 Unit	8.600.000.000,00	Bagian Umum
4 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	126 Unit	902.515.800,00	126 Unit	600.000.000,00	Bagian Umum



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja Penanggung Jawab
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	102 Unit	1.497.878.800,00	102 Unit	1.200.000.000,00	Bagian Umum
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.757.680.000,00	-	4.900.000.000,00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.973.294.000,00	12 Laporan	2.300.000.000,00	Bagian Umum
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	527.262.000,00	12 Laporan	700.000.000,00	Bagian Umum
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	257.124.000,00	12 Laporan	1.900.000.000,00	Bagian Umum
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.921.866.800,00	-	8.140.000.000,00	



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja Penanggung Jawab
			Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	133 Unit	1.367.848.800,00	133 Unit	2.100.000.000,00	Bagian Umum
4 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	258 Unit	255.308.800,00	258 Unit	300.000.000,00	Bagian Umum
4 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	7.175.752.000,00	10 Unit	5.600.000.000,00	Bagian Umum
4 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	296 Unit	122.957.200,00	296 Unit	140.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	1.473.969.500,00	-	1.570.000.000,00	
4 01 01 2.11 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	990.646.000,00	2 Orang/Bulan	1.000.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja Penanggung Jawab
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	351.508.000,00	7 Paket	410.000.000,00	Bagian Umum
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	131.815.500,00	2 Orang	160.000.000,00	Bagian Umum
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	1.195.208.200,00	-	1.365.000.000,00	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	202.130.000,00	4 Dokumen	235.000.000,00	Bagian Organisasi
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	225.092.900,00	5 Laporan	200.000.000,00	Bagian Organisasi
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	8 Dokumen	524.300.100,00	8 Dokumen	600.000.000,00	Bagian Organisasi
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	114.162.000,00	2 Dokumen	180.000.000,00	Bagian Organisasi



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja Penanggung Jawab
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	50 Dokumen	129.523.200,00	50 Dokumen	150.000.000,00	Bagian Organisasi
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	571.130.000,00	-	695.000.000,00	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	121.380.000,00	12 Laporan	165.000.000,00	Bagian Protokol Pimpinan
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	15 Laporan	128.850.000,00	15 Laporan	160.000.000,00	Bagian Protokol Pimpinan
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	320.900.000,00	12 Laporan	370.000.000,00	Bagian Protokol Pimpinan
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	17.351.827.300,00	-	15.563.000.000,00	Asisten Pemerintahan dan Kesra
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	648.655.800,00	-	736.000.000,00	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	244.740.600,00	3 Dokumen	230.000.000,00	Bagian Pemerintahan



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja Penanggung Jawab
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	127.310.000,00	1 Dokumen	216.000.000,00	Bagian Pemerintahan
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	276.605.200,00	4 Dokumen	290.000.000,00	Bagian Pemerintahan
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	15.954.174.500,00	-	14.150.000.000,00	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	15.530.994.800,00	6 Dokumen	13.700.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	2 Dokumen	134.239.900,00	2 Dokumen	130.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja Penanggung Jawab				
			Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8				
		Pengendalian Penduduk dan KB									
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	288.939.800,00	2 Dokumen	320.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja Penanggung Jawab
			Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	687.187.000,00	-	615.000.000,00	
4 01 02 2.03 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	25 Dokumen	90.401.000,00	25 Dokumen	135.000.000,00	Bagian Hukum
4 01 02 2.03 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	483.310.000,00	2 Kasus	320.000.000,00	Bagian Hukum
4 01 02 2.03 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	25 Dokumen	113.476.000,00	25 Dokumen	160.000.000,00	Bagian Hukum
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	61.810.000,00	-	62.000.000,00	
4 01 02 2.04 0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	61.810.000,00	10 Dokumen	62.000.000,00	Bagian Pemerintahan
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	2.255.333.950,00	-	2.475.000.000,00	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	923.166.800,00	-	930.000.000,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja Penanggung Jawab
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	7 Dokumen	435.000.000,00	7 Dokumen	475.000.000,00	Bagian Perekonomian dan SDA
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	52.726.200,00	6 Laporan	75.000.000,00	Bagian Perekonomian dan SDA
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	335.440.600,00	5 Dokumen	270.000.000,00	Bagian Perekonomian dan SDA
4	01	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	110.000.000,00	Bagian Perekonomian dan SDA
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	395.446.500,00	-	465.000.000,00	
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	83.533.100,00	2 Dokumen	110.000.000,00	Bagian Pembangunan
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	178.958.600,00	4 Laporan	210.000.000,00	Bagian Pembangunan



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja Penanggung Jawab
			Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4 01 03 2.02 0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	132.954.800,00	1 Laporan	145.000.000,00	Bagian Pembangunan
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	636.720.650,00	-	730.000.000,00	
4 01 03 2.03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	197.723.250,00	12 Dokumen	230.000.000,00	Bagian PBJ
4 01 03 2.03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	263.631.000,00	12 Dokumen	300.000.000,00	Bagian PBJ
4 01 03 2.03 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	175.366.400,00	50 Orang	200.000.000,00	Bagian PBJ
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	300.000.000,00	-	350.000.000,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	7 Dokumen	300.000.000,00	7 Dokumen	350.000.000,00	Bagian Perekonomian dan SDA	
J U M L A H									75.778.967.750,00		80.553.500.000,00	



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2026 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, serta Peraturan Bupati Grobogan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Sekretariat daerah Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis OPD Tahun 2025-2029 untuk Tahun Anggaran 2026.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



ANANG ARMUKANTO, S.SOS., M.SI.
NIP. 19730122 199302 1 001